

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan pengelola dan penyelenggara urusan pemerintahan pada wilayah desa. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang mana dipilih melalui pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai penyedia sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Pada Hari Selasa, Tanggal 17 Januari 2023, ratusan Kepala Desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PABDeSI) berunjuk rasa menuntut DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa (kompas.com diakses pada: 25 Februari 2023). Para Kepala Desa menuntut agar masa periode yang semula 6 tahun tersebut diubah menjadi 9 tahun. Dengan begitu, dapat diperkirakan bahwa kinerja yang mereka lakukan akan lebih optimal karena terbebas dari dampak negatif pemilihan kepala desa sebelumnya.

Keberhasilan pada suatu instansi dapat dilihat dari sejauh mana tujuan dari sebuah rencana tersebut dapat dicapai dengan sebaik mungkin oleh instansi, baik itu sifatnya organisasi pemerintahan ataupun organisasi swasta. Proses mencapai keberhasilan dalam suatu tujuan tentu harus melibatkan beberapa unsur penting dalam sebuah organisasi, yang mana diantaranya yaitu adanya sumber daya manusia dalam mengelolanya, serta sarana dan prasarana yang baik. Perkembangan zaman yang pesat ini, instansi pemerintahan terutama pemerintahan desa telah mengikuti modernisasi dengan cukup baik, seperti sudah melaksanakan pelayanan secara digital untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, termasuk yang telah diterapkan oleh beberapa pemerintahan desa dalam melayani administrasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa pun sudah

semestinya mengembangkan kinerja perangkat sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kinerja perangkat sendiri diukur dengan beberapa indikator kinerja dalam barometer pencapaian kerja individu. Dwiyanto mengatakan bahwasannya “Dalam mengukur kinerja organisasi pemerintah (Birokrasi Publik) disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Selanjutnya dikatakan bahwa indikator kinerja komprehensif karena mencakup dimensi-dimensi; kualitas layanan, produktivitas, responsivitas, responabilitas, dan akuntabilitas.”. Salah satu indikator dari pengukuran kinerja yang dipaparkan oleh berbagai para pakar, peneliti menentukan untuk menggunakan indikator dengan pengukuran hasil kerja yang dipaparkan oleh Agus Dwiyanto (2021). Indikator pengukuran kinerja birokrasi publik yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2021) mencakup lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responabilitas dan akuntabilitas. Tingkat keberhasilan tentunya melewati banyak proses yang mana di dalam terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam kinerja yang tentunya perihal tersebut sangat mempengaruhi dalam kinerja perangkat.

Dalam dinamika perkembangan zaman yang diprakarsai dengan kemajuan teknologi, perlu pula adanya peningkatan mutu sumber daya manusia agar tidak berat pada satu sisi. Dalam hal ini, elemen yang seharusnya meningkat salah satunya ialah golongan administrator pemerintahan atau birokrasi publik. Sebagai aktor terdekat dalam pelayanan kemasyarakatan, sudah semestinya berkemajuan seimbang dengan maju pesatnya perkembangan teknologi. Hal tersebut perlu dilakukan agar kinerja perangkat Pemerintahan Pusat hingga Pemerintahan Desa terintegrasi dengan baik dan benar.

Sebagaimana dapat diketahui bersama, bahwasannya dalam dunia kerja diperlukannya tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi dan disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja serta disiplin waktu menjadi tanggung jawab agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Berdasarkan observasi terdahulu yang di lakukan peneliti pada

saat di Kantor Desa Bakalan, permasalahan yang sering terjadi saat di Kantor Desa Bakalan, yaitu terkait masalah pada kurangnya efektifitas dan disiplin kerja pada kinerja perangkat Kantor Desa Bakalan. Atas dasar pemikiran yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **"Analisis Kinerja Perangkat Desa (Studi di Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka peneliti memiliki rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja perangkat Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan?
2. Apa Faktor Penghambat Dan Pendukung Kinerja Perangkat Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memiliki tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kinerja perangkat Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat serta pendukung kinerja perangkat Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan maupun pengetahuan pada berbagai kalangan dan juga dapat memberi masukan dalam hal pemikiran terhadap peningkatan kinerja pada perangkat Pemerintah Desa Bakalan dalam pelaksanaan pemerintahan agar dapat mewujudkan good governance.

2) Secara Praktis

Dalam hal ini diharapkannya dapat memberikan gambaran mengenai hasil responsibilitas dan hambatan maupun pendukung kinerja perangkat Pemerintah Desa Bakalan untuk meningkatkan berbagai upaya strategis dalam pengembangan pelayanan kemasyarakatan.